

MENGGAGAS PENDIDIKAN MULTIKULTUR DI INDONESIA

Anin Nurhayati

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung
email: umyidne@yahoo.com

Abstract: *Indonesia with diversity of ethnic, culture, tradition, social group, religion, and so on, on the one hand, has aroused the dynamics of cultural diversity and positive civilization; on the other hand, it will even become the cause of conflict and disintegration, if it is not managed wisely and comprehensively. Multicultural education in Indonesia, however, should not only become an academic discourse, but it needs to be implemented in the concrete sphere, among them is in the education realm. Here, we need a conceptual frame in its implementation, so that the problem that emerges as the effect of the diversity and religiousness bias does not become a heavy burden of this nation. Multicultural education is a reform as well as the process of education which inculcate to the students the values and beliefs the importance of uniqueness recognition at every ethnic, culture, and other social groups. There are at least five scopes in multicultural education, they are (1) promotion to strengthen cultural diversity; (2) promotion to respect human right and other different people; (3) promotion to act based on his own way of life for every human being; and (5) promotion to the importance of equality and distribution of authority among different social groups.*

المخلص: اندونيسيا مع التنوع العرقي والثقافة والتقاليد، والفئات الاجتماعية، والأديان، وما إلى ذلك، من جهة، وخلق ثروة التنوع الثقافي والحضاري الإيجابي، ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي يوما ما حتى للصراع وفتنة، إذا لم تحسن إدارتها والحكمة، وشاملة. لذلك، التعليم المتعدد الثقافات في إندونيسيا، وربما لا يقتصر على مناقشة فقط من الخطاب الأكاديمي، ولكن يجب أن يصبح مطلبًا ملحا للمطالبة حتى تنفذ في أكثر واقعية واسع المجال، من بين أمور أخرى، في عالم التعليم. هذا هو المكان الإطار المفاهيمي اللازم في التنفيذ، بحيث المشكلة، المشكلة التي تنشأ عن التحيز والتنوع الديني ليس عبئا ثقيلًا من اندونيسيا.

المشكلة التي تنشأ عن التحيز والتنوع الديني آيس عبثاً ثقيلاً من اندونيسيا. وإصلاح التعليم المتعدد الثقافات هو عملية التعليم ، فضلاً عن غرس القيم والمعتقدات للطلاب التعرف على أهمية هوية فريدة من نوعها من كل الفئات والعرقية الثقافية، وغيرها من الفئات الاجتماعية. هناك ما لا يقل عن خمسة من نطاق التعليم المتعدد الثقافات، وهي: (1) حملة لتعزيز التنوع الثقافي، (2) تعزيز حقوق الإنسان واحترام الآخرين المختلفين، (3) لتعزيز الخيارات حياة بديلة للجميع، (4) الحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل شخص، و(5) الترويج لأهمية المساواة وتوزيع السلطة بين مختلف الفئات الاجتماعية.

Keywords: Islam, Pendidikan multikultur, egaliter, humanis, inklusif

PENDAHULUAN

Pola berpikir keseragaman (monokultur) di era reformasi ini terbukti tidak efektif untuk mengelola masyarakat dan bangsa yang multi etnik dan multi budaya dan pola harus ditinggalkan. Sebagai gantinya, pola berfikir keberagaman (multikultur) mulai diberikan porsi yang seimbang untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan jati dirinya dan mengartikulasikan segala potensinya.

Pendidikan multikultur merupakan wahana untuk mengembangkan wawasan, mengkonstruksi pengetahuan, membina sikap toleran dan memberikan keterampilan kepada siswa untuk hidup “bersama” dengan siswa lain yang berbeda budaya (kultur) maupun agama. Gagasan dasar pendidikan multikultur adalah bagaimana seluruh siswa laki-laki, perempuan, yang sehat dan cacat, miskin, kaya, terdiri atas berbagai kelompok ras, agama, gender, dan etnik yang beragam, ataupun berbicara dalam ragam bahasa –seluruhnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah.

Pendidikan multikultur sebagai sebuah gagasan pendidikan yang ingin memberikan kesetaraan dan pengakuan akan ragam budaya memiliki sejarah panjang. Praktek pendidikan multikultur di berbagai negara, baik di Barat maupun di Timur telah menghasilkan suatu kesepakatan bersama (*mutual agreement*) bahwa salah satu pilar pendidikan adalah *living together*, yakni memberikan latihan dan keterampilan kepada para siswa akan pentingnya pengakuan dan penghargaan kepada orang yang memiliki ragam bahasa, budaya, etnis maupun agama.

ISLAM MENEROPONG PENDIDIKAN MULTIKULTUR

Multikulturalisme secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sistem nilai atau kebijakan yang menghargai keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima dan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda suku, etnik, gender, maupun agama.¹ Secara normatif-teologis, Islam sejak awal telah mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan atas keberbedaan yang ada, apapun perbedaan yang muncul di bumi ini.

Untuk melihat kaitan antara Islam dengan Pendidikan Multikultur, paling tidak ada 3 perspektif:

1. Perseptif Teologis

Beberapa ayat al-Qur'an yang secara jelas sangat apresiatif terhadap tumbuhnya nilai-nilai perbedaan, baik gender, bangsa maupun suku, seperti pada Surat al-Hujurat: 13, yaitu: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal ..."*. Pada Surat al-Rūm: 22 juga ditunjukkan tentang keharusan untuk saling menghormati dan menghargai di antara perbedaan bahasa dan warna kulit. Dikatakan bahwa *"di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui"*. Demikian juga dalam Surat al-Maidah: 48 dikatakan, *"... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu"*.

Dua ayat al-Qur'an yang pertama, al-Hujurat: 12 dan al-Rūm: 22 di atas, telah memberikan beberapa aksentuasi penting tentang pengakuan

¹M. Syafii Anwar, "Menggali Kearifan Pesantren untuk Multikulturalisme", Jurnal *Al-Wasathiyah*, Vol. 01, No. 01 Februari 2006, 2.

keberadaan “lian” menjadi bagian tak terpisahkan dari yang “lain”. Perbedaan gender, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, adalah semata-mata perbedaan artifisial yang sudah dikonstruksi oleh Allah dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelengkapan hidup dan kehidupan di dunia. Inilah yang kemudian disebut dengan *Sunnatullah* yang bisa menimpa siapa saja yang hidup di dunia. Jika demikian adanya, maka setiap perbedaan yang muncul —termasuk perbedaan tradisi/budaya dan lain-lain— yang melekat pada setiap umat bukanlah perbedaan yang muncul secara tiba-tiba, tapi sudah dikonstruksi sedemikian rupa oleh Allah Swt. Mengingat perbedaan tersebut merupakan *Sunnatullah*, maka siapa pun yang ada di kosmos ini harus dan wajib mengakui keberadaan “lian” sebagai bagian dari yang “lain” untuk bisa menghirup dan hidup di udara yang sama ini. Dengan demikian, siapa pun yang mengingkarinya, sudah barang tentu menyalahi, bahkan keluar dari *Sunnatullah* —atau mungkin menantang kodrat-Nya.

Landasan teologis-normatif di atas sebenarnya telah memberikan kejelasan justifikasi mengenai hubungan antar sesama yang telah melampaui batas-batas etnis, ras, kelompok, golongan, bahkan agama sekalipun. Untuk itu, bangunan wawasan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarianisme, pluralisme, multikulturalisme, humanisme, dan inklusifisme, tidaklah jauh pandangan Islam. Islam diturunkan di muka bumi justru untuk menciptakan nilai-nilai universal dengan misi besarnya sebagai agama “pendamai” dan “perahmat” (*rahmatan li al-alamin*).

2. Perspektif Historis

Sejarah Nabi Muhammad Saw. telah menunjukkan betapa pentingnya menjunjung prinsip-prinsip dasar nilai plural dan multikultural. Nabi sendiri telah hidup di tengah-tengah komunitas yang sangat plural dan multikultural. Ia membangun kebersamaan di tengah keragaman atas dasar teologi *la ilaha illallah* di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Yathrib, Madinah. Masyarakatnya tidak hanya terdiri dari satu etnis, suku, bangsa, maupun agama, namun sangat beragam. Ada sejumlah suku dominan yang mendiami kota itu, Suku Aus, Khazraj, Qainuqa, Quraidlah, dan Bani Nadzir. Demikian pula penduduknya menganut beragam agama: Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran. Dalam masyarakat Islam

sendiri terdapat dua latar belakang, yaitu kaum migran atau pendatang yang disebut dengan sahabat Muhajirin (dari beberapa suku asal Mekah dan sekitarnya), dan penduduk lokal yang biasa disebut sahabat Anshar, yang didominasi oleh suku Aus dan Khajraj. Sedangkan kaum Yahudi berasal dari suku Nadzir, Qainuqa, dan Quraidlah.² Dari keberagaman inilah, kemudian Nabi membuat suatu kesepakatan yang mengikat antar ragam yang ada, demi membangun kebersamaan, saling hormat dan menghargai akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terjalin komunitas yang tidak hanya stabil dan harmonis tapi juga bisa hidup saling berdampingan.

Kondisi masyarakat yang cukup plural dan multikultural tersebut, telah menginspirasi Nabi Muhammad Saw. untuk mendirikan apa yang kemudian dikenal dengan “Negara Madinah”. Konsep Negara Madinah tertuang dalam Piagam Madinah mengandung nilai-nilai universal, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan sama di mata hukum.³ Inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh pesantren-pesantren Indonesia pada umumnya.

Dalam kaitan ini, ada beberapa tradisi yang telah lama ditunjukkan oleh dunia pesantren, di mana pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua dalam perkembangan dinamika sejarah Indonesia. Hasil studi yang dilakukan oleh para pengamat menunjukkan bahwa sejak awal perkembangannya (awal abad 16), pesantren—atau sejenisnya semacam surau, dayah, dan lain-lain nama sesuai daerahnya—mendakwahkan Islam dengan ramah dan mudah berakomodasi dengan watak budaya nusantara. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, pesantren mempunyai peran yang besar dalam proses Islamisasi (termasuk Islamisasi budaya) di Indonesia, dan bahkan di Asia Tenggara.⁴

Kemampuan pesantren berakomodasi dengan watak budaya nusantara yang beraneka ragam secara mudah, dan tidak tertindas dengan kemajuan zaman, cukup menjadi bukti sejarah bahwa sejak awal pesantren telah melangkah dan berproses secara terbuka terhadap perbedaan dan keanekaragaman. Penelitian disertasi lapangan yang cukup menarik oleh

²Said Agil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), 27.

³Anwar, *Menggali Kearifan*, 29

⁴*Ibid.*, 3.

Lukens-Bull (1997) di Arizona State University (ASU) AS. mendukung hal ini bahwa kaum pesantren telah berhasil mengukir identitas baru. Mereka menolak dua bentuk taklid ala Kamal al-Taturk, dan bentuk penolakan Khumaini, terhadap segala sesuatu yang serba Barat dan modern. Komunitas pesantren sadar dan peka terhadap globalisasi dan McDonalisasi, tetapi tetap aktif merespon globalisasi dengan jihad damai pendidikan pesantren.⁵

Menurut catatan sejarah, keistimewaan yang berhasil dicapai oleh pesantren karena didukung oleh adanya kurikulum pendidikan pesantren yang banyak memuat paham-paham multikulturalisme. Sebut saja kitab kuning (klasik), yang hingga kini masih tetap menjadi elemen dasar kurikulum lembaga pendidikan pesantren.

Di antara contoh konkrit adalah kitab *al-Milāl wa al-Nihāl*, yang ditulis oleh al-Syahrastani (479-485 H). Kitab tersebut mengulas tentang *firqah-firqah* (golongan-golongan) baik di dalam Islam maupun di luar Islam yang dipaparkan secara obyektif tanpa adanya keperluan menghina atau pun memuji. Selain itu juga kitab *al-Fiqh al-Madhāhib al-Arba'ah* (kitab empat madzhab) ditulis oleh al-Jazairi yang mengulas mengenai perbandingan pendapat ulama fiqih di lingkungan empat madzhab. Dari kedua kitab ini cukup jelas sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat multikulturalisme yang ditanamkan.⁶

Dalam perkembangan sejarah kemerdekaan hingga berdirinya Republik Indonesia ini, pesantren telah menelorkan *pioneers* dan *Founding Fathers*, misalnya K.H. Hasyim Asy'ari dan putranya K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, Prof. Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, HAMKA, dan lain-lain. Mereka semua adalah alumni pesantren, yang tidak hanya mumpuni dalam bidang agama, juga karena komitmennya dalam mempertahankan nilai-nilai universal kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga

⁵Masdar Farid Mas'udi, "Mengenal Pemikiran Kitab Kuning", dalam *Pergulatan Pesantren: Membangun dari Bawah*, M. Dawam Rahardjo (ed.) (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985), 218.

⁶Syafiq Hasyim, "Belajar Multikulturalisme dari Pesantren", *Jurnal Al-Wasathiyah*, Vol. 1, No. 1, Februari 2006, 66.

karena kepemimpinan dan semangat nasionalisme dan kebangsaannya yang tinggi.⁷

3. Perspektif Sosiologis

Dalam kenyataan sejarah, pesantren telah menunjukkan perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu merespon perkembangan modernisasi secara kritis serta mengarahkannya ke arah kehidupan yang lebih berwatak, kreatif, dan emansipatoris.

Hiroko Horikoshi, seorang antropolog Jepang dalam disertasinya yang berjudul *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kyai and Ulama' in West Java*, (1976) menegaskan bahwa kyai dan pesantren sangat berperan dalam proses perubahan sosial menuju ke arah kualitas kehidupan dan kerja yang lebih baik di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Selain itu Manfred Ziemek, berasal dari Jerman yang telah menulis disertasi berjudul *Pesantren Islamische Bildung in Sozialen Wandel* (telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *Pesantren dan Perubahan Sosial*, P3M, 1986), juga mengatakan bahwa kepemimpinan pesantren yang moralis, terbuka, humanis, dan emansipatoris telah berhasil mengantarkan pesantren sebagai agen perubahan yang kritis dan partisipatoris terhadap arus modernisasi yang tak terelakkan lagi dalam sejarah. Tesis Horikoshi dan Ziemek ini telah meng-*counter* tesis antropolog terkemuka Clifford Geertz yang cenderung kurang memberikan apresiasi terhadap peranan kyai sebagai agen perubahan sosial.⁸

Dengan demikian, Islam multikultural adalah semacam perspektif teologis tentang penghargaan terhadap keragaman dan “sang lian” (*the other*). Suatu *assessment* teologis mengenai agama lain, kultur lain, dan etnik lain, dan penempatannya secara layak dalam wilayah tatanan publik etis. Ia merupakan teologi Qur’ani yang membolehkan “sang lian” menjadi “yang lain” sebagai realitas yang secara etis diperkenankan atau bahkan keniscayaan.

Inilah perspektif teologis abad 21 yang berkomunikasi melampaui bahasa dan tradisi partikular. Meminjam istilah Abdulaziz Sachedina, ini merupakan *sensibilitas ekumene* dari teologi multikulturalis yang

⁷Anwar, *Menggali Kearifan*, 4.

⁸Marzuki Wahid, dalam *Tashwirul Afkar*, No 11, 2001, 46-49.

menggambarkan perhatian dan kepedulian terhadap penduduk dunia, mempengaruhi kehidupan mereka melampaui batas-batas komunitas-komunitas keagamaan dan kultural. Tujuan luhur teologi multikulturalis (*summum bonum*) adalah pembebasan dari belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, kezaliman, dan ketidakadilan sebagai akibat dari relasi kolonial atas-bawah, dominasi-subordinasi, superior-inferior, menindas-tertindas baik dalam hubungan antar agama, etnik dan budaya.⁹

Dalam konteks tersebut memperbincangkan diskursus Islam multikultural di Indonesia menemukan momentumnya. Sebab, selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal—bukan jamak atau multikultural. Padahal, di Nusantara realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun global (global-lokal). Secara lokal, misalnya, Islam di Nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspektif dikotomi Deliar Noer, yaitu Islam tradisional dan modern; dan masih banyak lagi pandangan lain seperti liberal, fundamental, moderat, radikal dan sebagainya. Secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo.¹⁰

Berdasar pada ketiga diskursus di atas, pendidikan multikultural dalam Islam sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini paling tidak telah ditunjukkan oleh dunia pesantren dengan sistem dan pola pengajarannya yang sarat akan nilai-nilai multikulturalisme. Kondisi demikian tidak hanya dapat disaksikan melalui proses pengajaran dan pembelajarannya, tetapi juga materi atau kurikulum yang diajarkannya. Di pesantren—sepanjang pengamatan dan pengalaman penulis—senantiasa diajarkan nilai-nilai moralitas untuk saling menghormati dan menghargai antar ragam, corak dan kemajemukan yang ada di sesama umat manusia, baik perbedaan agama, adat-istiadat, budaya, dan sebagainya. Inilah yang kemudian disebut dengan “tradisi pesantren”, yang merupakan dialog dan pergulatan panjang antara doktrin Islam dan tradisi setempat. Di dalam pesantren, melalui ajaran moralitas dan tasawuf (akhlaq) yang disampaikan, telah berkembang ajaran-

⁹Zakiyudin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), 3.

¹⁰Choirul Fuad, “Mengkaji Ulang Islam Multikultural”, dalam <http://islamlib.com>.

ajaran perlunya menjunjung tinggi sikap-sikap toleransi (*tasamuh*), bersikap moderat (*tawasuth*) dan senantiasa konsisten dan optimis (*ta'adul* dan *istiqamah*). Inilah nilai-nilai dasar pembentukan karakter yang mesti ditanamkan dalam diri siswa selanjutnya.

Dengan demikian, pendidikan multikultur harus mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, daerah asal, dan strata sosial. Pendidikan multikultur, sebagaimana ditegaskan oleh James Banks dalam *El-Ma'hady*¹¹ paling tidak pendidikan yang mempunyai lima dimensi yang saling berkaitan.

- 1) *Content integration*. Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
- 2) *The knowledge construction process*. Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
- 3) *An equity pedagogy*. Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
- 4) *Prejudice reduction*. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
- 5) Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Dalam kaitan ini, ada beberapa pertanyaan yang mesti dipertimbangkan, jika pendidikan multikultur ingin dipraktekkan dalam dunia pendidikan secara menyeluruh. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, apakah siswa yang masuk ke dalam lembaga pendidikan tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk dirinya secara penuh tanpa memandang ras, etnisitas, gender, status sosio-ekonomi, bahasa, kemampuan dan ketidakmampuan, serta identitas sosial lainnya?

¹¹Muhaemin El-Ma'hady, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural", dalam <http://artikel.us/muhaemin>, 2004, 4.

Kedua, apakah kerja pendidikan yang ditawarkan kepada para siswa itu kontekstual dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas?¹²

MENUJU PENDIDIKAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR

Pendidikan multikultur dimulai di Amerika Serikat (AS) sebagai gerakan reformasi pendidikan dalam rangka memperjuangkan hak-hak sipil kaum Amerika keturunan Afrika pada tahun 1960-an dan 1970-an. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar pada lembaga-lembaga pendidikan. Di antara kegagalan siswa dari kelompok marjinal yang putus sekolah di sana, disebabkan oleh lemahnya pemahaman tentang “pengetahuan budaya” untuk mencapai keberhasilan akademik para siswa.

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam pemahaman pengetahuan budaya kepada siswa tersebut. Terkait dengan ini, James Banks mendeskripsikan evolusi pendidikan multi budaya dalam fase-fase berikut. *Pertama*, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap tingkat kurikulum. *Kedua*, hal ini diikuti oleh pendidikan multi etnis, sebagai satu usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok marjinal yang lain seperti perempuan, orang cacat, kaum homo dan lesbi mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. *Keempat*, terjadinya perkembangan teori, riset dan praktek, perhatian pada hubungan antar ras, kelamin dan kelas (sosial) telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis dan praktisi pendidikan multikultur.¹³

Menurut Tilaar perkembangan pendidikan multikultur di Amerika Serikat telah menempuh 4 fase perkembangan pendidikan sebagai berikut: *pertama*, Pendidikan yang bersifat *segregasi*; *kedua*, Pendidikan menurut konsep *salad bowl*; *ketiga*, Pendidikan menurut konsep *melting pot*; dan *keempat*, Pendidikan multikultural.¹⁴

¹²Baidhawiy, *Pendidikan Agama*, 33.

¹³J Banks, “Multicultural Education: Historical Development, dimensions, and Practice”, dalam *Review of Research in Education*, 1994, 19.

¹⁴H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004.

Pendidikan yang bersifat *segregasi* dengan jelas membuat pemisahan dan pengelompokan sosial atas dasar ras dan warna kulit, yang dalam hal ini adalah ras kulit putih dan ras kulit hitam. Ras kulit putih sebagaimana diwujudkan dalam kebudayaan WASP (*White, Anglo Saxon, and Protestant*) yang dominan pada waktu itu mengadakan garis pemisah antara etnis kulit berwarna yang disebut Negro yang dianggap lebih rendah, dengan kelompok etnis putih yang dianggap mempunyai hak-hak istimewa, bahkan diperoleh langsung dari Sang Pencipta.

Sesuai dengan namanya, pendidikan menurut konsep *salad bowl* adalah pendidikan “gado-gado” yang semuanya dicampur dan dimasukkan dalam bejana atau “*bowl*”. Di dalam kehidupan sehari-hari berarti masing-masing kelompok etnis dapat hidup berdampingan secara damai dan keseluruhannya merupakan suatu perpaduan yang masing-masing berdiri sendiri. Tentunya konsep *salad bowl* tersebut belum merupakan suatu tujuan yang optimal di dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam masing-masing budaya kelompok etnis yang memilikinya. Masing-masing etnis yang hidup bersama tidak peduli satu sama lainnya, masing-masing mengurus dirinya sendiri.

Dalam konsep *melting pot*, masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antar sesamanya. Namun dengan menyadari adanya perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Di sinilah terjadi sintesa kebudayaan dari masing-masing kelompok, yang dalam hal ini dimediasi melalui penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan multikultur, asal-usul budaya dan agama orang tidak dipersoalkan lagi dalam kehidupan bersama termasuk di sekolah, justru dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut dibangun komitmen-komitmen baru dalam masyarakat.

Di Indonesia, Jika ingin membangun pendidikan multikultur sebagaimana yang diproyeksikan oleh Amerika, maka paling tidak ada lima dimensi pendidikan multikultur yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Proses mengkonstruksi pengetahuan, membantu siswa untuk memahami bagaimana asumsi-asumsi budaya secara implisit dalam suatu disiplin mempengaruhi cara-cara pengetahuan itu dikonstruksikan di dalamnya.

2. Mengurangi prasangka kelompok merupakan karakteristik dari perilaku rasial para siswa, dan bagaimana perilaku mereka dapat diubah melalui pengajaran.
3. Suatu pemberdayaan untuk budaya sekolah dan struktur sosial, berbagai praktek pelabelan kelompok, partisipasi olah raga, dan interaksi antara staf (guru) dan siswa, antar etnik dan ras merupakan beberapa komponen yang mesti dipahami sebagai cara untuk membangun budaya sekolah yang memperkuat para siswa dari seluruh kelompok (yang beragam).
4. Suatu kesempatan yang sama dalam pendidikan, memadukan gaya mengajar guru dan belajar siswa yang berbeda dalam rangka pencapaian akademik para siswa dari ras, budaya, maupun kelompok sosial yang beragam.
5. Mengandung Integrasi, menggunakan beragam contoh dan isi dari berbagai budaya dan kelompok yang berbeda untuk memberikan ilustrasi atas berbagai konsep, prinsip, generalisasi, dan teori-teori kunci dalam berbagai mata pelajaran maupun disiplin (ilmu).¹⁵

Implementasi pendidikan multikultur dalam berbagai jenjang pendidikan hendaknya sejalan dengan keseluruhan isi pendidikan multikultur. Namun demikian jika ditilik dari isinya, kelima dimensi pendidikan multikultur di atas menyiratkan adanya permasalahan berupa “apa yang menjadi pesan utama pendidikan multikultur”. Pendidikan multikultur mengutamakan persamaan (*equality*) ataukah mengedepankan keberagaman (*diversity*). Masing-masing pilihan tentunya mengandung konsekuensi logis. Pilihan terhadap prioritas mana yang akan didahulukan akan disesuaikan dengan konteks sosio budaya masing-masing masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan “apa yang menjadi pesan utama pendidikan multikultur” di atas, berikut ini diajukan dua pendekatan, yaitu: (a) pendekatan tradisional dan (b) pendekatan etnosentris. Dalam pandangan pendekatan tradisional, tujuan utama dari pendidikan awal (sekolah dasar) tidaklah mengajarkan perbedaan kepada siswa. Untuk itu, para pendidik harus memahami keberagaman, namun pada saat yang bersamaan mencari

¹⁵*Ibid.*

kesamaan-kesamaan di antara berbagai keberagaman yang ada pada diri siswa.¹⁶ Dijelaskan bahwa salah satu tujuan siswa belajar di kelas adalah untuk mempelajari suatu identitas publik. Anak-anak belajar bilangan dan angka yang krusial untuk bertahan dalam kehidupan bersama (*public*), dan belajar untuk meletakkan diri pada konteks publik, bagian dari komunitas keluarga maupun etnik.

Pendekatan etnosentris lebih menekankan akan keunikan identitas masing-masing kelompok dalam masyarakat. Perbedaan budaya bukanlah suatu kesalahan. Pengetahuan akan kebiasaan dan masyarakat lain memberikan pilihan kepada siswa. Dalam pendekatan ini, suatu kurikulum multikultural mencoba memberikan penilaian akan keberagaman, dengan mengajarkan suatu kurikulum yang terbuka kepada siswa dengan latar belakang yang beragam.

Pendidikan multikultur selain bermanfaat dalam membentuk wacana multikultural, ternyata efektif juga untuk mengurangi prasangka kelompok satu terhadap kelompok lainnya.¹⁷ Oleh karena itu, pembentukan wacana multikultur pada masyarakat Indonesia dapat menjadi medium bagi upaya untuk mereduksi munculnya budaya prasangka yang pada gilirannya dapat berfungsi sebagai pemicu munculnya konflik-konflik.

Hal yang melandasi pemilihan tema ini adalah multikulturalisme pada dasarnya juga bagian dari kebenaran agama. Pemahaman yang ingin dibentuk melalui pendidikan multikultur adalah sikap beragama yang bercorak inklusif, humanis, dan pada saat bersamaan menjauhkan kehidupan agama dari bentuk yang bercorak eksklusif (tertutup). Sebab salah satu bahaya pemahaman eksklusif terhadap sebuah keyakinan adalah hilangnya penghargaan terhadap keyakinan lain. Padahal kisah penghargaan terhadap perbedaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama sebagaimana terucap dalam kitab-kitab suci.

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah agama damai dan agama rahmat bagi seluruh alam yang hidup di muka bumi ini. Namun demikian, yang kemudian muncul sebagai bibit persoalan, tidak sedikit ayat-

¹⁶*Jawa Pos*, 18 April 2007.

¹⁷P. Waterworth & F. Hanurawan, "Multicultural Perspectives in Indonesia Sosial Studies and Student Prejudice Reduction", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 4, 1997.

ayat dalam kitab suci yang dapat dimaknai ganda bahkan mengandung bias, mengajarkan saling menghargai sekaligus mendorong eksklusivisme. Di sinilah perlu kiranya dikembangkan wacana multikulturalisme dalam kehidupan beragama bagi setiap pemeluk agama melalui cara beragama yang lebih bercorak inklusif (terbuka), yang mengedepankan kebersamaan tanpa harus kehilangan keyakinan dan identitas keagamaannya.

Untuk mentransformasikan nilai-nilai multikulturalisme pada diri siswa, sekaligus menanamkan kehidupan keberagaman yang inklusif, peran fungsional guru adalah strategis. Melalui dialog interaktif-edukatif di kelas, guru akan dapat mentransformasikan pengetahuan, sikap maupun nilai-nilai inklusif kepada siswa.

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, seperti terungkap dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Ulasan mengenai multikulturalisme, harus mencakup berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat mutu produktivitas.

Kalau dilihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat sampai perang dunia ke-2, masyarakat di wilayah tersebut hanya mengenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih (*white skin*) yang Kristen. Golongan lain yang ada dalam masyarakat tersebut dikategorikan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka dikebiri atau dibatasi. Di Amerika Serikat, berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam (*black skin*) serta kulit berwarna (*colour skin*) mulai muncul di akhir tahun 1950-an. Puncaknya adalah pada tahun 1960-an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dan berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkan perjuangan hak-hak sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan *affirmative action*.

Kegiatan ini membantu mereka yang terpuruk dan minoritas, untuk dapat mengejar ketertinggalannya dari kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam beragam bidang pekerjaan.¹⁸

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1970-an yang diwarnai dengan penyebaran konsep multikulturalisme ini dalam bentuk mulai diberikannya pendidikan multikultur pada siswa di berbagai sekolah. Bahkan dewasa ini anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan suku bangsa lainnya dapat belajar di sekolah dengan menggunakan bahasa-bahasa ibu mereka dalam tahap-tahap tertentu.

Bagi bangsa Indonesia, model masyarakat multikultural dapat menjadi bingkai untuk memformat masyarakat Indonesia baru. Sebagai sebuah model masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan ideologi multikulturalisme, atau “bhineka tunggal eka yang multikultural”, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional.¹⁹

Oleh karena itu, sebagai landasan bagi bangunan masyarakat Indonesia yang multikultural, diperlukan adanya pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak, sesuai dengan adab dan moral bangsa Indonesia. Pedoman etika yang ada hendaknya memuat nilai-nilai dasar filosofis multikulturalisme yang berorientasi pada penghormatan HAM, kesejahteraan dan keadilan sosial.

MENGGAGAS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTUR DI INDONESIA

Pentingnya pendidikan multikultur bagi bangsa Indonesia setidaknya karena dua alasan penting, yaitu: (1) kemajemukan budaya, etnisitas, faham, dan religi yang terdapat dalam masyarakat, dan (2) kecenderungan tatanan masyarakat masa depan dengan cirinya, yakni era globalisasi.

Dalam kaitan ini ada beberapa contoh diskriptif implementatif pendidikan multikultur yang dapat diterapkan di sekolah, berikut peran guru dan sekolah yang mesti ditampilkan, antara lain:

¹⁸Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, No 69, 2002.

¹⁹Thoha Hamim, “Islam dan Hubungan Antar Umat Berbagi” dalam *FORMA*, Surabaya: Majalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2001, Edisi XXVI, 2.

1. Membangun model keberagaman inklusif di sekolah

Diskripsi masalah:

Beberapa bulan setelah kasus pemboman dua buah kafe di kota A, seorang guru, setelah membaca sebuah media, berbicara tentang kasus tersebut di depan murid-muridnya. Seorang guru bercerita bahwa apa yang telah dilakukan oleh B dan kawan-kawan adalah bagian dari jihad. Seorang guru menambahkan bahwa B cs, menurut agama, tidak berdosa telah melakukan tindakan pengeboman tersebut, karena para korban adalah orang kafir yang beragama C yang sedang berhura-hura di sebuah kafe.

Penjelasan seorang guru di atas jelas jauh dari bangunan keberagaman inklusif. Sebab dia memberikan penjelasan yang salah terkait dengan tindakan pembenaran terhadap tindakan pengeboman yang dilakukan oleh B, dan menjustifikasi salah terhadap kelompok lain. Seorang guru seharusnya memberikan pemahaman bahwa tindakan B dan kawan-kawannya adalah tindakan yang dilarang baik di mata hukum maupun agama manapun. Seorang guru harus juga menjelaskan bahwa agama manapun telah mengajarkan kedamaian dan saling menghormati, tidak dibenarkan berlaku anarkis kepada pemeluk agama lain.

Selain guru, sekolah juga harus berperan aktif dalam membangun model keberagaman inklusif di sekolah. Oleh karena itu, sekolah hendaknya memperhatikan langkah-langkah berikut: *Pertama*, sekolah hendaknya membuat undang-undang atau semacam peraturan lokal, yaitu peraturan yang secara khusus diterapkan di sekolah tertentu, khususnya terkait dengan larangan adanya diskriminasi agama di sekolah. Peraturan ini harus dilaksanakan oleh semua pihak sekolah; tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tersebut.

Kedua, agar membangun rasa saling pengertian sejak dini di antara siswa-siswa pemeluk agama yang berbeda, dengan melakukan dialog antar agama dan antar iman. Tentunya seorang guru harus senantiasa mendampingi dan membimbingnya dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini sangat efektif karena siswa-siswi dididik untuk belajar menghargai dan mengapresiasi antar pemeluk agama, sehingga di kemudian menjadi suatu kebiasaan.

Ketiga, tidak kalah pentingnya dari kedua hal di atas adalah perlu dirumuskan kurikulum berbasis multikulturalisme, yaitu kurikulum yang memuat strategi pendidikan berbasis multikulturalisme. Kurikulum demikian merupakan sebuah keniscayaan. Kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi umat beragama. Buku-buku yang dipakai di sekolah juga harus buku-buku yang membangun wacana siswa-siswi tentang pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat.

2. Menghargai keragaman bahasa di sekolah

Diskripsi masalah:

Ada kisah di salah satu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berada di kota A. Kejadian penting yang oleh sebagian orang dianggap sebuah kejadian yang wajar-wajar saja. Ketika ada seorang murid (sebut saja B) mengacungkan tangan dan kemudian memulai untuk mengungkapkan pendapatnya, tiba-tiba teman si B tertawa ketika mendengarkan bahasa Indonesia si B yang lekat dengan logat, aksen, dan dialek jawanya. Pak guru yang duduk di depan kelas yang sebenarnya sudah berusaha untuk menahan tawa, akhirnya juga ikut-ikutan tertawa. Si B menjadi agak bingung ketika tahu teman-temannya menertawakannya. Akibat dari situasi yang demikian ini, si B tidak bisa berkonsentrasi. Pendapat dan tanggapan yang dia ungkapkan menjadi tidak jelas dan tidak seperti yang ingin dia ungkapkan semua.

Kejadian di atas menunjukkan bahwa seorang guru seharusnya tidak melakukan hal demikian. Sebab dengan ikut menertawakan si B berarti guru tidak menghargai dan mengapresiasinya. Seorang guru seharusnya tidak ikut tertawa, dan memberikan penjelasan bahwa apa yang disampaikan murid baik yang menyangkut logat bahasa, aksen dan gaya penyampaiannya harus dihargai dan diapresiasi, sebab hal demikian merupakan karakter dan natural. Guru juga harus memberikan penjelasan kepada murid-murid bahwa tingkah laku seperti di atas adalah tidak etis dan tidak sopan.

Terkait dengan hal di atas, paling tidak ada dua poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru. *Pertama*, guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keragaman bahasa. Pemahaman ini penting mengingat guru adalah yang patut *digugu* dan ditiru dalam memberikan sikap *egaliter* kepada pihak lain. Dengan sikap guru demikian, maka siswa-siswi akan belajar untuk dapat menghargai dan menghormati orang lain.

Kedua, guru harus memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya adalah terhadap kasus yang terjadi di kelas tadi, dengan menertawakan temannya. Seharusnya guru harus segera menghentikan dan memberikan penjelasan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak terpuji dan dilarang dalam kegiatan akademis.

Ketiga, peran sekolah dalam kaitan ini adalah dengan membuat peraturan tentang tidak adanya diskriminasi bahasa, seperti menertawakan, mengejek, menghina bahasa orang lain (termasuk di dalamnya aksen dan dialek) di sekolah tersebut.

3. Sensitifitas gender dalam pendidikan multikultural

Diskripsi masalah:

Dalam sebuah diskusi di kelas, seorang murid laki-laki, tiba-tiba mengeluarkan ungkapan yang tidak sepatutnya ketika seorang temannya yang kebetulan perempuan menanggapi pernyataannya. Dia mengungkapkan kata “dasar perempuan banyak omong”...terhadap teman perempuannya itu. Ungkapannya yang spontan itu membuat sebagian temannya yang lain tertawa, meskipun sebagian yang lain mengerutkan dahi ketika mendengarnya.

Melihat kejadian di atas, seorang guru seharusnya menjelaskan kepada siswa lain yang meng*counter* dengan “dasar perempuan banyak omong” adalah tindakan yang semana-mena dan tidak etis. Paling penting yang harus dijelaskan seorang guru kepada murid adalah bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam dunia pendidikan. Dalam mengungkapkan

pendapat pun tidak diperbolehkan ada diskriminasi. Siapa saja dalam sebuah forum diskusi, mempunyai hak sama —termasuk banyak omong— tanpa terkecuali, apakah laki-laki ataupun perempuan sekalipun.

Terkait dengan hal di atas, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. *Pertama*, guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Hal ini penting karena guru merupakan figur utama yang menjadi pusat perhatian murid di dalam kelas. Dengan wawasan gender yang cukup oleh guru, diharapkan tidak ada diskriminasi antara siswa laki-laki dan siswi perempuan.

Kedua, guru harus bersikap anti diskriminasi gender. Guru di sini tidak hanya dituntut memahami teks-teks gender, namun juga harus bisa mempraktekkan nilai-nilai kesetaraan gender tersebut secara langsung di kelas atau di sekolah.

Ketiga, guru harus sensitif terhadap permasalahan gender. Guru hendaknya sensitif terhadap perlakuan diskriminatif gender baik dalam kelas maupun di luar kelas. Jika di dapati adanya perlakuan diskriminasi gender, guru harus segera menghentikan dan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi bahwa tindakan tersebut adalah tindakan diskriminatif, dan tidak diperbolehkan dalam masyarakat plural.

Di samping itu, sekolah juga memiliki peran yang harus dijalankan, antara lain: *Pertama*, sekolah harus memiliki peraturan secara tertulis tentang larangan adanya diskriminasi gender di sekolah maupun di kampus. Dengan peraturan yang dibuat, maka seluruh tenaga pendidik dan kependidikan harus taat menjalankan peraturan tentang larangan diskriminasi gender tersebut. Dengan demikian, akan membawa konsekuensi terhadap pembentukan karakter siswa dalam menghormati dan menghargai hak-hak lain jenis dalam proses pendidikan.

Kedua, sekolah harus rajin mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, dan diskusi-diskusi ke-genderan, agar seluruh pengelola pendidikan (kepala sekolah, guru, karyawan, staf, yayasan, murid, dan lain-lain) dapat memiliki pemahaman utuh terkait dengan sensitifitas gender, sehingga dalam perkembangan selanjutnya tidak ada lagi tindakan diskriminatif di kalangan sekolah atau kampus.²⁰

²⁰Lihat M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Dengan demikian, sekolah dan seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya. Namun lebih dari itu, sekolah dan seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme.

PENUTUP

Multikulturalisme sebenarnya bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Multikulturalisme—jika ditilik dalam sejarahnya yang panjang—pada hakikatnya adalah ciri khas asli masyarakat Indonesia. Multikulturalisme menjadi menarik untuk diperbincangkan, karena saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada pupusnya rasa kebersamaan, persaudaraan, kesetiakawanan sosial, keadilan, konflik antar anak bangsa, rasa nasionalisme, dan lain-lain. Jika demikian adanya, maka tidak ada salahnya memilih multikulturalisme sebagai *mainstream* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran solutif dalam rangka menjawab kompleksitas persoalan bangsa. Sudah saatnya pendidikan multikultur di Indonesia menjadi pilihan penting seiring dengan munculnya keberagaman di berbagai aspek, baik tradisi, kultur, etnik, faham, kelompok/golongan, maupun agama, di tengah-tengah kehidupan kita, di samping tuntutan sosial di era global.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, M. Syafii. “Menggali Kearifan Pesantren untuk Multikulturalisme”. *Jurnal Al-Wasathiyah*. Vol. 01, No. 01 Februari 2006.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. “Ber-Islam di Era Multikultural”. dalam <http://islamlib.com>.
- Banks, J. “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice”, dalam *Review of Research in Education*, 19, 1994.

- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.
- El-Ma'hady, Muhaemin. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural". dalam <http://artikel.us/muhaemin>, 2004.
- Fuad, Choirul. "Mengkaji Ulang Islam Multikultural". dalam <http://islamlib.com>.
- Hamim, Thoha. "Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama". *FORMA*, Surabaya: Majalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Edisi XXVI, 2001.
- Hanurawan, F. & P. Waterworth. "Multicultural Perspectives in Indonesia Sosial Studies and Student Prejudice Reduction". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, 1997.
- Hasyim, Syafiq. "Belajar Multikulturalisme dari Pesantren". *Jurnal Al-Wasathiyah*, Vol. 1, No. 1, Februari 2006. Jawa Pos, 18 April 2007.
- Mas'udi, Masdar F. "Mengenal Pemikiran Kitab Kuning", dalam *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, M. Dawam Rahardjo (ed.). Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985.
- Siradj, Said Agil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung: Mizan, 2006.
- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural". *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 69, 2002.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004.
- Wahid, Marzuki. *Tashwirul Afkar*, No. 11, 2001.
- Widja, I.G. dan K. Putra. "Pendidikan Multikultur" makalah disajikan dalam *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia V*, Surabaya: 5-9 Oktober 2004.
- Wignyo Subroto, Sutandyo. "Pluralitas dalam Realitas Kehidupan Nasional (dengan Berbagai Permasalahan SARA-nya), Pluralisme dan Persatuan Indonesia", Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional "Konsep SARA dalam Tinjauan"*, Surabaya: Kosmopolit, 1998.
- Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural: Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

